

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori sinyal menjelaskan alasan perusahaan menyajikan informasi untuk pasar modal (Sudaryanti & Dinar, 2019). Teori sinyal menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal-sinyal pada pengguna laporan keuangan. Teori tersebut dilatarbelakangi oleh asumsi bahwa pihak manajemen atau internal perusahaan memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi perusahaan dibandingkan informasi yang dimiliki pihak luar. Berdasarkan kondisi tersebut, perusahaan akan berusaha menggunakan informasi yang mereka miliki untuk memberikan pesan kepada pihak luar mengenai kinerja yang mereka capai. Pesan tersebut akan direspon sebagai sinyal baik atau sinyal buruk oleh pihak luar, sehingga respon tersebut dapat direspon pasar dalam menilai kualitas perusahaan serta dapat membantu perusahaan mengambil kebijakan untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Prediksi *Financial Distress* memberikan sinyal bagi manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan tentang kinerja mereka dan bagi pihak luar dalam memprediksi keberlangsungan kerjasama mereka dengan perusahaan.

Menurut Berliana (2017) teori sinyal merupakan sinyal-sinyal informasi yang dibutuhkan oleh investor untuk mempertimbangkan dan menentukan apakah para investor akan menanamkan sahamnya atau tidak pada perusahaan yang bersangkutan. Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi sinyal bagi pihak diluar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah laporan tahunan. Laporan tahunan hendaknya memuat informasi yang relevan dan mengungkapkan informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh pengguna laporan baik pihak dalam maupun pihak luar.

Berdasarkan penjelasan dari teori sinyal, peneliti berpendapat mengenai teori sinyal yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *financial distress*.

2.2 Financial Distress

Financial distress adalah kondisi dimana perusahaan mengalami penurunan keuangan atau kerugian secara terus menerus sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi Zulaecha (2018). *Financial distress* juga bisa diartikan situasi ketika perusahaan tidak memiliki asset yang cukup untuk melunasi kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya (Vionita & Herlina, 2019). Kondisi ini merupakan ciri khas yang dialami oleh perusahaan sebagai akibat dari beberapa kondisi yang terjadi dari dalam perusahaan, seperti manajemen yang tidak mampu mengelola perusahaannya dengan baik maupun factor yang berasal dari luar perusahaan yang tidak mampu dikendalikan perusahaan. Kondisi *financial distress* terlihat dari ketidakmampuan perusahaan atau tidak tersedianya dana untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo (Berliana, 2017).

Menurut (Putri & Danang, 2020) terdapat beberapa definisi kesulitan keuangan menurut tipenya, antara lain sebagai berikut:

1. *Economic Failure*

Economic failure atau kegagalan ekonomi adalah keadaan dimana pendapatan perusahaan tidak cukup untuk menutupi total biaya, termasuk *cost of capital*. Bisnis ini masih dapat melanjutkan operasinya sepanjang kreditur bersedia menerima tingkat pembelian (*rate of return*) yang dibawah pasar.

2. *Business Failure*

Kegagalan bisnis didefinisikan sebagai bisnis yang menghentikan operasi dengan mengalami kerugian.

3. *Technical Insolvency*

Adapun sebuah perusahaan bisa dikatakan dalam keadaan *technical insolvency* apabila suatu perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban

lancarnya ketika jatuh tempo. Ketidakmampuan membayar hutang secara teknis menunjukkan bahwa perusahaan sedang kekurangan likuiditas yang bersifat sementara, dimana jika diberikan beberapa waktu, maka kemungkinan perusahaan bisa membayar utang dan bunganya tersebut. Disisi lain, apabila *technical insolvency* merupakan gejala awal kegagalan ekonomi, ini mungkin bisa menjadi sebuah tanda perhentian pertama menuju *bankruptcy*.

4. *Insolvency in Bankruptcy*

Insolvency in Bankruptcy bisa terjadi disuatu perusahaan apabila nilai buku utang perusahaan tersebut melebihi nilai pasar asset saat ini. Kondisi tersebut bis dianggap lebih serius jika dibandingkan dengan *technical insolvency*, karena pada umumnya hal tersebut merupakan tanda kegagalan ekonomi, bahkan mengarah likuidasi bisnis.

5. *Legal Bankruptcy*

Perusahaan dapat dikatakan mengalami kegagalan kebangkrutan secara hukum apabila perusahaan tersebut mengajukan tuntutan secara resmi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Purwanto(2020) mendefinisikan kondisi *financial distress* sebagai suatu kondisi dimana perusahaan mengalami delisted akibat laba bersih dan nilai buku ekuitas negatif berturut-turut serta perusahaan tersebut telah di merger. *Financial distress* juga merupakan konsep luas yang terdiri dari beberapa situasi dimana suatu perusahaan menghadapi masalah kesulitan keuangan, istilah umum untuk menggambarkan situasi tersebut adalah kegagalan, kepailitan, *default*, dan kebangkrutan.

Menurut (sumber: www.kajianpustaka.com, Oktober 2018) secara umum *financial distress* dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

1. *Financial Distress* Kategori “Sangat Tinggi”

Perusahaan sudah dikatakan berada pada posisi bangkrut atau pailit sehingga memungkinkan perusahaan melaporkan pihak terkait seperti pengadilan dan

menyerahkan berbagai urusan untuk ditangani oleh pihak luar perusahaan.

2. *Financial Distress* Kategori “Tinggi”

Perusahaan harus memikirkan berbagai solusi dalam menyelamatkan sebagian asset yang dimiliki seperti sumber-sumber asset yang ingin dijual atau dipertahankan. Termasuk memikirkan dampak jika dilakukannya *merger* (penggabungan) dan akuisisi (pengalihan).

3. *Financial Distress* Kategori “Sedang”

Perusahaan sudah harus melakukan perubahan berbagai kebijakan dan konsep manajemen yang diterapkan selama ini, bahkan jika perlu melakukan perekrutan tenaga ahli baru yang memiliki kompetensi tinggi untuk ditempatkan pada posisi strategis yang bertugas mengendalikan dan menyelamatkan perusahaan, termasuk target dalam menaikkan perolehan laba.

4. *Financial Distress* Kategori “Rendah”

Perusahaan dianggap hanya mengalami fluktuasi financial yang diakibatkan dari berbagai kondisi eksternal dan internal termasuk dalam pengambilan keputusan yang kurang tepat.

Nirmalasari(2018) menyebutkan informasi *financial distress* bisa bermanfaat bagi beberapa pihak seperti pihak bank, investor, pemerintah, akuntan dan manajemen. Informasi kebangkrutan bisa bermanfaat untuk mengambil keputusan bagi pihak-pihak yang akan memberi pinjaman, dan bermanfaat untuk kebijakan memonitor pinjaman yang ada. Kebangkrutan berarti munculnya biaya-biaya yang berkaitan dengan kebangkrutan dan biaya ini cukup besar. Suatu penelitian menunjukkan biaya kebangkrutan bisa mencapai 11-18% dari nilai perusahaan. Apabila manajemen bisa mendeteksi kebangkrutan ini lebih awal, maka tindakan-tindakan penghematan bisa dilakukan, missal dengan melakukan merger atau restrukturisasi keuangan sehingga biaya kebangkrutan bisa dihindari.

(Helena & Saifi, 2018) menyebutkan *financial distress* terjadi sebelum

perusahaan mengalami kebangkrutan dan dimulai dari ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas. Menurut Fathonah, (2016) *financial distress* terjadi karena perusahaan tidak mampu mengelola dan menjaga kestabilan kinerja keuangan perusahaannya yang bermula dari kegagalan dalam mempromosikan produk yang dibuatnya yang menyebabkan turunnya penjualan sehingga dengan pendapatan yang menurun dari sedikitnya penjualan memungkinkan perusahaan mengalami kerugian operasional dan kerugian bersih untuk tahun berjalan.

Permasalahan *financial distress* yang dialami oleh suatu perusahaan akan memberikan dampak negative berupa kerugian yang akan diderita oleh berbagai pihak, diantaranya adalah perusahaan itu sendiri, *sharesolders*, *stakeholders* dan juga perekonomian global (Susilawati et al., 2017).

(Nirmalasari, 2018) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya financial distress pada perusahaan adalah:

1. Faktor Umum

a) Sektor Ekonomi

Faktor penyebab financial distress dari sector ekonomi adalah gejala inflasi dan deflasi dalam harga barang dan jasa, kebijakan keuangan, suku bunga dan devaluasi atau revaluasi uang dalam hubungannya dengan uang asing serta neraca pembayaran, surplus atau deficit dalam hubungannya dengan perdagangan luar negeri.

b) Sektor Sosial

Factor social sangat berpengaruh terhadap financial distress cenderung pada perubahan gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi permintaan terhadap produk dan jasa ataupun cara perusahaan berhubungan dengan karyawan.

c) Teknologi

Penggunaan teknologi informasi juga menyebabkan biaya yang ditanggung

perusahaan membengkak terutama untuk pemeliharaan dan implementasi. Pembengkakan terjadi apabila penggunaan teknologi informasi tersebut kurang terencana oleh pihak manajemen, sistemnya tidak perlu dan para manajer pengguna kurang profesional.

d) Sector pemerintah

Pengaruh dari sector pemerintah bersumber dari kebijakan pemerintah terhadap pencabutan subsidi pada perusahaan dan industri, pengenaan tarif ekspor dan impor barang berubah, kebijakan undang-undang baru bagi perbankan atau tenaga kerja lainnya.

2. Faktor Eksternal Perusahaan

a) Faktor pelanggan/konsumen

Perusahaan harus bias mengidentifikasi sifat konsumen, karena berguna untuk menghindari kehilangan konsumen, juga untuk menciptakan peluang untuk menemukan konsumen baru dan menghindari menurunnya hasil penjualan dan mencegah konsumen berpaling ke pesaing.

b) Faktor kreditur

Kekuatannya terletak pada pemberian pinjaman dan mendapatkan jangka waktu pengembalian utang yang tergantung kepercayaan kreditur terhadap likuiditas suatu perusahaan.

c) Faktor pesaing

Faktor ini merupakan hal yang harus diperhatikan karena menyangkut perbedaan pemberian pelayanan kepada konsumen, perusahaan juga jangan melupakan pesaingnya karena jika produk pesaing lebih diterima oleh masyarakat perusahaan tersebut akan kehilangan konsumen dan mengurangi pendapatan yang diterima.

3. Faktor Internal Perusahaan

a) Terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada konsumen sehingga akan menyebabkan adanya penunggakan dalam pembayaran sampai akhirnya tidak dapat membayar.

b) Manajemen tidak efisien yang disebabkan karena kurang adanya kemampuan, pengalaman, keterampilan, sikap inisiatif dari manajemen.

c) Penyalahgunaan wewenang dan kecurangan dimana sering dilakukan oleh karyawan bahkan manajer puncak sekalipun sangat merugikan apalagi yang berhubungan dengan keuangan perusahaan.

d)

Rasio yang digunakan untuk menghitung *financial distress* adalah dengan menggunakan alat ukur ICR. *Interest Coverage Ratio* adalah rasio untuk menilai seberapa besar kemampuan perusahaan membayar bunga dari utang yang masih tercatat dalam pembukuannya, Rama(2018). Rasio ini dapat dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga yang telah jatuh tempo dalam periode tertentu. Jika *interest coverage ratio* menunjukkan angka lebih dari 1 maka tergolong sebagai perusahaan yang mengalami *financial distress* dan dalam pengkodean variabel dummy diberi kode 0, sedangkan jika *interest coverage ratio* menunjukkan angka kurang dari 1, maka perusahaan dikatakan mengalami *financial distress* dan dalam pengkodean diberi kode 1.

2.3 Good Corporate Governance

Corporate Governance adalah sistem mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan, kreditor, dan masyarakat sekitar, Fathonah(2016). *Good corporate governance* berusaha menjaga keseimbangan diantara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. *Good corporate governance* juga dapat memutuskan sukses atau tidaknya dalam mengelola suatu perusahaan agar kondisi keuangan yang tidak sehat atau *financial distress* tidak terjadi.

Pemisahan tugas-tugas dan kewajiban yang dilakukan pihak prinsipal dan agen dalam teori keagenan akan memicu timbulnya konflik yang akan merugikan prinsipal. Dalam kondisi ini, diperlukan sebuah mekanisme yang berfungsi untuk menyetarakan perbedaan kepentingan antara pihak agen dan pihak prinsipal. Perspektif tentang hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *good corporate governance*. Konsep *good corporate governance*

adalah konsep yang memperhatikan dan mengatur segala kepentingan antara pihak prinsipal dan agen dalam sebuah perusahaan. Menurut Berliana(2017) menyatakan bahwa: *good corporate governance* juga didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, Manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan *stakeholder internal* maupun eksternal, mengenai hak dan kewajiban mereka, atau system dimana perusahaan diatur dan dikendalikan, tujuan *good corporate governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder*.

Dalam fungsinya sebagai penyeimbang dalam perusahaan, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam *good corporate governance*. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, dan transparan mengenai semua kinerja perusahaan (Berliana 2017).

Good corporate governance merupakan mekanisme yang dikembangkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan perilaku manajemen. Beberapa mekanisme *good corporate governance* adalah kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi dan ukuran komite audit, (Berliana 2017). Maka dari itu mekanisme *corporate governance* yang digunakan diprosikan dengan:

2.3.1 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial diartikan sebagai presentase kekuasaan atau kepemilikan dalam suatu perusahaan. Kepemilikan manajerial diukur dengan jumlah presentase saham yang dimiliki manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham biasa yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan dimana juga aktif terlibat dalam keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Adanya kepemilikan manajerial dapat meningkatkan monitoring dalam suatu perusahaan (Sukarna dan Mildawati, 2016).

Salah satu cara untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan meningkatkan kepemilikan saham manajerial. *Agency cost* timbul karena adanya perbedaan informasi antara agen dan prinsipal. *Agency cost* sendiri diminimalkan dengan cara meningkatkan jumlah saham yang dimiliki manajemen. Semakin besar jumlah saham kepemilikan manajemen maka manajemen akan cenderung berusaha untuk meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan dirinya sendiri yang sebagai pemegang saham juga. Kepemilikan manajerial juga dipercaya dapat mengurangi konflik agensi yang terjadi, karena mensejajarkan kepentingan dan manajemen dengan pemegang saham. Kepemilikan manajerial membuat manajemen lebih berhati-hati dalam mengelola perusahaan dan mengambil keputusan, karena manajemen akan ikut menanggung akibatnya senadainya perusahaan mengalami sesuatu yang merugikan (Listiana, 2018).

2.3.2 Ukuran Dewan Direksi

Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, dewan direksi merupakan seorang profesional yang dipilih oleh pemilik perusahaan untuk memimpin dan mengelola perusahaannya. Dewan direksi akan menentukan kebijakan yang akan diambil untuk perusahaan namun dalam teori agensi dewan direksi dapat membuat kebijakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri sehingga dapat terjadinya *conflict of interest* dengan prinsipal yang dapat membuat perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan atau *financial distress*. Dalam mekanisme *good corporate governance*, dewan direksi juga mempunyai peran yang sangat penting. Dewan direksi merupakan bagian dari perusahaan dalam menentukan dan mengambil kebijakan strategi suatu perusahaan baik dalam jangka pendek maupun panjang (Sukarna dan Mildawati, 2016).

2.3.3 Ukuran Komite Audit

Komite audit sesuai dengan Keputusan Bapepam Nomor Kep.29/PM/2004 menyebutkan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Komite audit berperan dalam hal memelihara kredibilitas laporan keuangan, menjaga system pengawasan serta pengawasan terlaksananya *good corporate governance*.

Ukuran komite audit adalah jumlah anggota komite audit yang ada diperusahaan. Ukuran komite audit diatur dalam surat edaran ketua Bapepam yang menyatakan bahwa ukuran komite audit adalah sekurang-kurangnya 3 orang.

2.4 Profitabilitas

Menurut (Berliana, 2017), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini adalah semakin baik karena laba yang diperoleh semakin besar.

Profitabilitas menunjukkan apakah suatu perusahaan memiliki prospek yang baik dimasa mendatang. Rasio profitabilitas ini dapat digunakan untuk memprediksi resiko terjadinya *financial distress*. Perusahaan yang mengalami kondisi financial distress akan menunjukkan rasio profitabilitasnya negative. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka perusahaan akan menghasilkan laba yang semakin besar, sehingga mampu meminimalisir terjadinya kondisi *financial distress*.

Ramadhan(2019), menyebutkan bahwa berikut jenis-jenis rasio profitabilitas beserta pengertiannya:

1. Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Adalah perhitungan antar penjualan dengan beban. Perhitungan GPM berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melakukan controlling terhadap biaya persediaan.

2. Margin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)

Jenis rasio margin ini merupakan perhitungan keuntungan murni atas kegiatan operasional perusahaan berupa proses penjualan yang telah dilakukan.

3. Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Adalah salah satu rasio perhitungan untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan yang dilakukan perusahaan.

4. Rasio Pengembalian Aset (*Return On Assets Ratio*)

Perhitungan rasio ROA sangat bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja perusahaan mengenai keuntungan yang dihasilkan terhadap aset yang dimiliki. Semakin tinggi laba bersih yang dihasilkan terhadap aset, semakin meningkat pula skor dari ROA. Semakin tinggi skornya, semakin bagus kinerja perusahaan.

5. Rasio Pengembalian Ekuitas (*Return On Equity Ratio*)

Jenis rasio yang satu ini merupakan instrument penghitung kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba terhadap ekuitas atau modal yang diberikan oleh para pemegang saham.

6. Rasio Pengembalian Penjualan (*Return On Sales Ratio*)

Merupakan jenis perhitungan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan lebih tinggi dari biaya variabel demi kepentingan produksi.

7. Pengembalian Modal Yang Digunakan (*Return On Capital Employed*)

Perhitungan ini berfungsi untuk mengukur keuntungan perusahaan terhadap keseluruhan modal yang dimiliki.

8. *Return On Investment* (ROI)

Perhitungan ini bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap aktiva yang dimiliki.

9. *Earning Per Share* (EPS)

Jenis perhitungan yang satu ini berfungsi untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan dilihat dari nilai perlembar saham untuk menghasilkan laba.

Salah satu rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return*

On Asset(ROA). ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan penggunaan asset. Dengan adanya efektifitas dari pengguna asset perusahaan maka akan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka perusahaan akan memperoleh penghematan dan akan memiliki kecukupan dana untuk menjalankan usahanya. Dengan adanya kecukupan dana tersebut maka kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress* akan lebih kecil.

2.5 Leverage

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik jangka panjang maupun jangka pendek (Susilawati et al., 2017). *Leverage* merupakan sumber dana eksternal karena leverage mewakili hutang yang ada dalam suatu perusahaan Zulaecha (2018). Semakin besar rasio ini maka semakin besar kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan (*financial distress*).

Perusahaan yang memiliki aktiva/kekayaan yang cukup untuk membayar semua utang disebut perusahaan yang solvable namun belum tentu likuid. Sedangkan yang sebaliknya disebut insolvable, namun belum tentu tidak likuid.

Menurut (sumber: <https://dosenakuntansi.com/macam-macam-rasio-leverage>, 2018), menyebutkan berikut macam-macam rasio leverage:

1. *Total Debt to Equity Ratio* (Rasio Utang Terhadap Ekuitas)

Semakin tinggi nilai rasio ini berarti modal sendiri (pribadi) semakin sedikit dibandingkan dengan utang yang harus dibayar.

2. *Total Debt to Total Asset Ratio* (Rasio Utang Terhadap Total Aktiva)

Rasio ini menunjukkan seberapa besar bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh utang. Rasio ini juga untuk mengukur presentase dana yang berasal dari semua utang yang dimiliki oleh perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

3. *Times Interest Earned Ratio*

Times interest earned ratio merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga pada masa yang akan datang.

Salah satu rasio leverage yang digunakan dalam penelitian ini adalah *total debt too asset ratio* (DAR). Rasio ini menekankan pada peran penting pendanaan utang bagi perusahaan dengan menunjukkan presentase aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang. Semakin kecil rasio ini adalah semakin baik karena kewajiban jangka panjang lebih sedikit dari modal dan atau aktiva.

2.6 Penelitian yang Terdahulu

TABEL 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Andina Nur Fathonah, (2016) Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Financial Distress</i>	Variabel Independen <i>Good Corporate Governance</i> Variabel Dependen <i>Financial Distress</i>	<i>Good corporate governance</i> berpengaruh negative terhadap <i>financial distress</i>
2.	Della, Dkk (2017) Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap <i>Financial Distress</i> pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).	Variabel Independen <i>Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Leverage</i> Variable Dependen <i>Financial Distress</i>	Profitabilitas, ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i>
3.	Agustina Berliana Tampubolon (2017) Analisis Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate</i>	Variabel Independen <i>Good Corporate Governance</i> dan	<i>Good Corporate Governance</i> dan Leverage tidak berpengaruh terhadap

	<i>Governance dan Leverage terhadap Financial Distress</i>	<i>Leverage</i> Variabel Dependen <i>Financial Distress</i>	kemungkinan terjadinya <i>financial distress</i>
4	Yuni Kurnia Sari (2018) Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Profitabilitas terhadap <i>Financial Distress</i>	Variabel Independen <i>Good Corporate Governance</i> dan Profitabilitas, Variabel Dependen <i>Financial Distress</i>	<i>Good Corporate Governanace</i> dan Profitabilitas berpengaruh negative terhadap <i>financial distress</i>
5	Vionita &Herlina (2019) Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Financial Distress</i>	Variabel Independen Kinerja Keuangan dan <i>Good Corporate Governance</i> Variabel Dependen <i>Financial Distress</i>	Kinerja keuangan dan <i>good corporate governance</i> berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>
6	Alfitra Afif Ramadhan(2019) Pengaruh <i>Financial Ratio (WCTA, RETA, EBIT,BVOE), Good Corporate Governance,</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Terjadinya <i>Financial Distress</i> pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index	Variabel Independen <i>Financial Ratio (WCTA, RETA, EBIT, BVOE, good corporate governance</i> dan ukuran perusahaan Variabel Dependen <i>Financial Distress</i>	Variabel <i>WCTA, RETA, EBIT, BVOE,</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> <i>Good corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Financial distress</i>
7	Aulia Eky Wijayanti(2019) Pengaruh <i>Corporate Governance, Likuiditas, Leverage</i> dan ukuran	Variabel Independen <i>corporate governance, likuiditas, leverage</i> dan	<i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>financial distress</i>

	perusahaan terhadap <i>Financial Distress</i>	ukuran perusahaan Variabel dependen <i>Financial distress</i>	<i>Corporate governance</i> , likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap <i>financial distress</i>
8	Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Financial Distress Hasnita Wulandari(2021)	Variable Independen Rasio Keuangan Variabel Dependen Financial Distress	<i>Profitabilitas</i> dan Likuiditas berpengaruh positif terhadap <i>financial distress</i> <i>Leverage</i> berpengaruh negative terhadap <i>financial distress</i> .

Sumber diolah : tahun 2022

2.7 Kerangka Berpikir

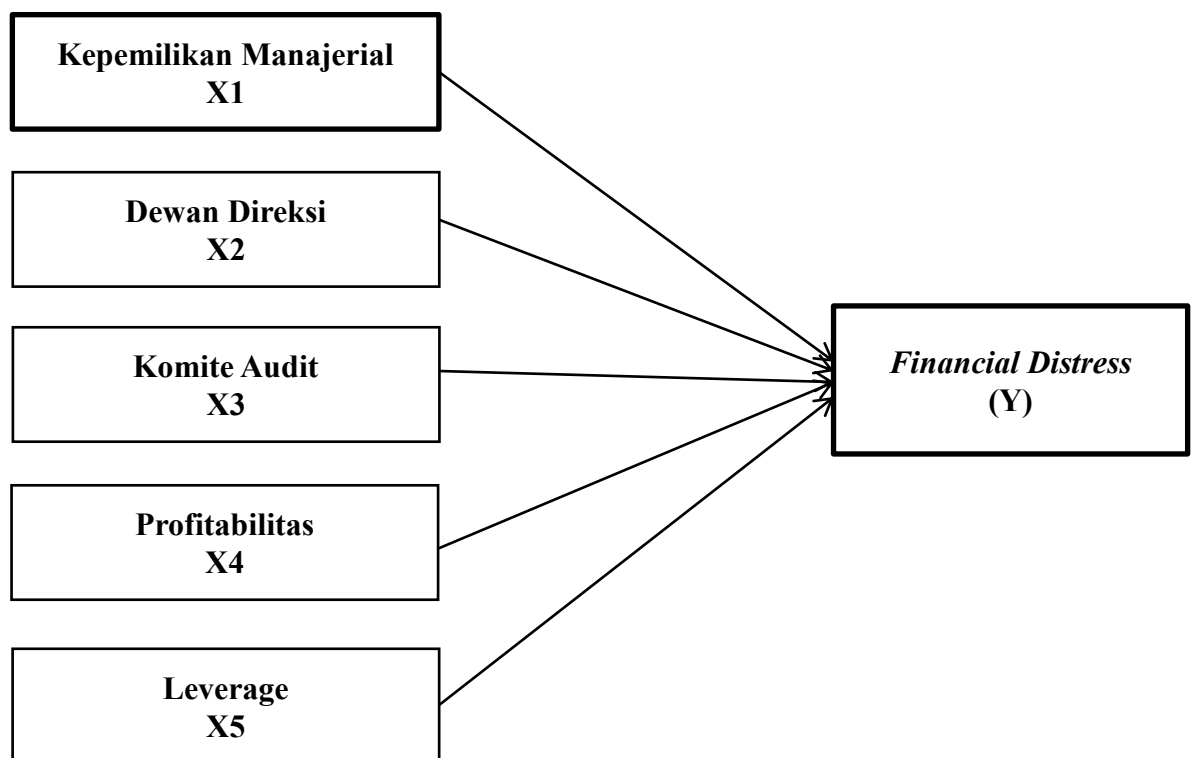
Kerangka berpikir merupakan alur yang menggambarkan proses berpikir yang dituangkan dalam bentuk hubungan antar variable yang diteliti dan cara pengukurannya serta hasil penelitian yang diharapkan. Kerangka penelitian menjelaskan alasan pemilihan suatu variable penelitian dan bagaimana hubungan antar variable penelitian yang dikembangkan dalam model penelitian yang akan diteliti.

Menurut Wulandari (2018), apabila suatu pembiayaan lebih banyak menggunakan hutang, maka akan beresiko terjadi *financial distress* dimasa yang akan datang.

Jika keadaan ini tidak dapat diatasi dengan baik, maka potensi terjadinya *financial distress* akan semakin besar. Semakin tinggi rasio *leverage* suatu perusahaan maka kemungkinan terjadinya *financial distress* semakin tinggi.

Dari pernyataan diatas dapat dilihat kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



Keterangan:

- Y = *Financial Distress*
- X₁ = Kepemilikan Manajerial
- X₂ = Dewan Direksi
- X₃ = Komite Audit
- X₄ = Profitabilitas

$X_5 = Leverage$

2.8 Bangunan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Financial Distress*

Kepemilikan manajerial adalah presentase jumlah saham yang dimiliki manajemen dari seluruh jumlah saham perusahaan yang dikelola, (Putri dan Danang, 2020). Hal ini berkaitan dengan rasa memiliki yang tinggi terhadap saham tersebut sehingga diharapkan dapat mengurangi *financial distress*. Kepemilikan manajerial juga merupakan mekanisme dalam *corporate governance* yang efektif untuk monitoring yang akan menghasilkan kualitas pelaporan lebih baik (Sukarna & Mildawati, 2016). Apabila terdapat kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan maka manajer akan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Hal ini disebabkan jika perusahaan mengalami kemunduran maka manajer menanggung resiko. Dengan adanya kepemilikan manajerial yang tinggi diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan karena manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan *stakeholder*. Dalam kaitannya dengan *financial distress* semakin tinggi kepemilikan manajerial maka akan semakin menambah usaha manajemen untuk membawa perusahaan ke arah lebih baik.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Andina Nur Fathonah (2016) dan Vionita Herlina (2019) yang menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *financial distress*. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1 = Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap terjadinya *financial distress*

2.8.2 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap *Financial Distress*

Dewan Direksi merupakan pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan. Dewan

Direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Dewan direksi merupakan salah satu mekanisme *good corporate governance* yang diperlukan untuk mengurangi *agency problem* antara pemilik dan manajer sehingga timbul keselarasan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer. Menurut Susilawati et al., (2017), menyatakan semakin besar jumlah dewan direksi, semakin kecil potensi terjadi kesulitan keuangan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Yuni Kurnia Sari, (2018) yang menunjukkan dewan direksi berpengaruh terhadap *financial distress*. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H2= Ukuran Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap terjadinya *financial distress*

2.8.3 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap *Financial Distress*

Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam implementasi GCG. Menurut Nirmalasari, (2018), komite audit merupakan mekanisme *corporate governance* yang diasumsikan mampu mengurangi masalah keagenan yang timbul pada suatu perusahaan yang apabila terjadi terus menerus dapat menimbulkan *financial distress* pada perusahaan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Agustina Berliana Tampubolon, (2017) yang menunjukkan komite audit berpengaruh terhadap *financial distress*. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H3= Ukuran Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap terjadinya *financial distress*

2.8.4 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Financial Distress*

Rasio Profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula ROA,

hal itu berarti bahwa perusahaan semakin efektif dalam penggunaan aktiva untuk menghasilkan keuntungan(Sari 2017). Jumlah laba yang besar akan menunjukkan bahwa perusahaan tidak akan terkena *financial distress*. Penelitian ini menggunakan tingkat kembalian atas aset atau *return on asset* (ROA) untuk mengukur tingkat pendapatan perusahaan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Susilawati et al., 2017) dan Hasnita Wulandari(2021) yang menunjukkan profitabilitas berpengaruh terhadap *financial distress*. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:
H4= Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap terjadinya *financial distress*

2.8.5 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Financial Distress*

Leverage merupakan sumber dana eksternal karena *leverage* mewakili hutang utang ada dalam suatu perusahaan. Semakin besar rasio *leverage* pada perusahaan, maka semakin tinggi pula nilai hutang suatu perusahaan maka semakin tinggi pula nilai hutang suatu perusahaan, sehingga semakin besar pula investasi yang didanai dari pinjamannya. Hutang akan berakibat terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan dimasa yang akan datang. Apabila perusahaan mengalami gagal bayar akan berakibat kebangkrutan pada perusahaan. Jika nilai *leverage* yang tinggi, maka kemungkinan perusahaan akan mengalami *financial distress* semakin tinggi.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Susilawati et al., 2017) dan Aulia Eky Wijayanti, (2019) yang menunjukkan *leverage* berpengaruh terhadap *financial distress*. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H5= *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap terjadinya *financial distress*.

